

BUMN JAMIN STOK PUPUK SUBSIDI AMAN



sumber gambar: canva.com

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pasokan pupuk bersubsidi¹ tersedia hingga akhir 2023. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebut pasokan pupuk subsidi telah tersedia dua kali lipat dari yang disyaratkan pemerintah, yaitu 1,4 juta ton per Oktober 2023. "Stok pupuk subsidi sudah dua kali lipat dari yang disyaratkan. Jadi, aman (stoknya) 1,4 juta ton per Oktober," kata Rahmad di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).

Rahmad juga menegaskan bahwa pupuk bersubsidi dapat didistribusikan sampai akhir tahun. Berdasarkan data Pupuk Indonesia, stok pupuk bersubsidi per 10 Oktober 2023 sebanyak 1.442.553 ton. Sejumlah ini setara dengan 263% atau dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah. Rincian stok pupuk subsidi tersebut yakni urea 941.712 ton dan NPK 500.841 ton. Seluruh stok ini tersedia di gudang lini I hingga lini III atau tingkat kabupaten. Untuk memastikan pupuk terdistribusi dengan cepat dan tepat sasaran, Pupuk Indonesia menggunakan 13 kapal dengan 179 rute, 8.107 truk sewa dengan 1.049 rute, serta mengoperasikan 4 kompleks pelabuhan khusus.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan adanya permasalahan utama yang menjadi kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada para petani yang masih belum merata.

Menurut Kartika, data penerima pupuk subsidi harus diperbaharui. "Pasokan sebenarnya ada, memang sekarang ini isunya (permasalahan) di data," ucap Tiko di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan alasan masih adanya petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi. Ia mengatakan, para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi ini karena belum memiliki Kartu Taniⁱⁱ. "Di sini persoalannya kemarin adalah kami dari lapangan, pupuk ada 1 juta, tapi di sisi lain petaninya berteriak. Artinya ada yang *miss*, ada yang tidak sinkron," kata Amran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).

Alasan petani belum memiliki Kartu Tani karena sejumlah hal. Ada yang karena domisilinya jauh di pegunungan dan tak memiliki pendidikan yang memadai. "Jadi gini, di lapangan ini yang enggak punya Kartu Tani, kemudian daerah pegunungan jauh dari kota, ini yang sulit dapatkan pupuk dan tidak punya kartu," kata Amran.

Sumber berita:

1. <https://finance.detik.com/industri/d-7023971/bumn-jamin-stok-pupuk-subsidi-aman-capai-1-4-juta-ton>, Selasa, 7 November 2023.
2. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/11/07/masih-ada-petani-yang-belum-dapat-pupuk-subsidi-wamen-bumn-sebut-masalahnya-di-data-penerima>, Selasa, 7 November 2023.

Catatan:

Pengaturan mengenai pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pasal 2 Permendag dimaksud mengatur bahwa *holding* BUMN Pupuk diberikan tugas untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan *Holding* BUMN Pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Penyaluran pupuk subsidi kepada petani atau kelompok petani dilaksanakan oleh Pengecer. Pengecer Pupuk Bersubsidi (Pengecer) adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli dengan kegiatan pokok melakukan

penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya. Dan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani atau kelompok tani di pengecer menggunakan Kartu Tani dan/atau sistem penebusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Permendag Nomor 4 Tahun 2023.

Pelaporan pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan oleh *Holding* BUMN Pupuk. *Holding* BUMN wajib menyampaikan laporan Pengadaan, Penyaluran, dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian secara berkala setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

ⁱ Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. (Pasal 1 angka 1 Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian)

ⁱⁱ Kartu Tani adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di Pengecer. (Pasal 1 angka 16 Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian)